



PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA KARANG SENTOSA

Korin Aulia Rahmi^{1*}, Dewi Noor Azijah¹, Hanny Purnamasari¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang
Jawa Barat, Indonesia

*korinrahmi@gmail.com

Dikirim : 11/01/2022
Diterima : 23/03/2022
Terbit : 21/04/2022

Abstract

Villages have a good opportunity to take care of their own governance, including financial management, thereby bringing the scope of national financial management not only to ministries and provincial governments, but also to the rural sector. For this reason, resources and supporting facilities are needed in the administration of government that supports good governance by implementing the most strategic E-Government by making the Village Financial System Application (SISKEUDES) as a tool for the village government to make it easier to manage village finances from the planning, budgeting, administration to the computerized reporting or accountability stage in order to improve the quality of village financial management so as to prevent the occurrence of criminal acts of corruption in Karang Sentosa Village, Bekasi Regency. This study uses a qualitative descriptive method, collecting data through interviews and observations. The results show that the implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) has brought major changes to the Karang Sentosa Village Government by producing transparent and accountable financial reports. However, even so, village financial management still requires supervision from all levels of the village, in order to play a good role in maintaining village financial management and preventing corruption and criminal acts by village heads and other village cadres. Because corruption is an act that can harm the state and society.

Keywords: SISKEUDES, Accountability, Transparency, Corruption

Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinyatakan dalam mata uang, serta mata uang dan barang-barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. (Morenly Marchel Welly, 2018, p. 80)

Dikutip berdasarkan situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia menyatakan bahwa alokasi anggaran yang disediakan pemerintah terus bertambah. Dan Rp 71,85 triliun pada tahun 2022 yang dialokasikan untuk 74,939 Desa. Menurut (Sunarya,2018) adanya tanah di wilayah yang kecil dan bersifat pelosok membuat keuangan membutuhkan pengelolaan yang sangat besar. Namun dikutip berdasarkan artikel dari situs Kominfo menyebutkan bahwa pasca Undang-Undang Desa dirilis tahun 2014, BPKP melaksanakan survey ke desa di lima provinsi. Hasil dari survei tersebut memperlihatkan pengetahuan perangkat desa sangat rendah dalam hal keuangan desa. Dari hal tersebut terdapat kasus seperti yang dilansir Kompas.com Kepala Desa Karang Sentosa yaitu Achmad Surahman, diberhentikan oleh Bupati Bekasi Sa'duddin pada tahun 2010 setelah diketahui menyelewengkan dana bantuan raksa desa Provinsi Jawa Barat pada 2005, yang merugikan negara Rp. 30,45 juta. Ia divonis 5 bulan penjara dan denda Rp. 3 juta yang setara dengan 2 bulan penjara.

Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan infrastruktur, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas dan bantuan fasilitas teknologi informasi yang sesuai. Maka penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan berbasis elektronik atau *E-Government*, yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan meningkatkan efektivitas, inovasi, jangkauan, dan biaya yang menghasilkan tata pemerintahan yang baik (Ekaputra, 2021, p. 63).

Untuk mendukung *good governance* dengan penerapan *E-Government* yang paling strategis dalam mengatasi permasalahan minimnya pengetahuan perangkat desa dalam hal keuangan desa, maka pada tahun 2015 pemerintah pusat Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membuat aplikasi SISKEUDES agar dapat meningkatkan literasi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa yang dapat diandalkan, menurut (Sry Anita Gusasi; Felmi D. Lantowa, 2021).

Dikutip dari situs Kominfo, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan SE No. 147/8350/BPD pada 27 November 2015, yang mengarahkan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan SISKEUDES secara gratis kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Biaya pengajaran atau pembinaan SISKEUDES kepada perangkat desa di tingkat Kabupaten/Kota dianggarkan di masing-masing APBD, dan pada 31 Agustus 2016, KPK mengeluarkan SE B.7508/01-16/08/2016 untuk seluruh kepala desa agar dapat memahami dan memanfaatkan sepenuhnya SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Kantor Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia merupakan desa yang berada pada pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang kini telah menggunakan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2015 hingga saat ini dan perlu dikelola secara kompeten

agar laporan keuangan tidak dapat dimanipulasi. Maka penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) harus transparan agar masyarakat dapat selalu mengawal keuangan desa. Nantinya penggunaan aplikasi SISKEUDES ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi seperti yang pernah dilakukan oleh Kepala Desa Karang Sentosa pada tahun 2010.

Penelitian terdahulu sebagai dasar perbandingan dan dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

Pertama, Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan), yang dilakukan oleh Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni dan Putu Sukma Kurniawan dengan hasil penelitian Penerapan SISKEUDES di Desa Kaba-kaba telah membantu pekerjaan lebih tertata dan terarah dan dapat menghasilkan output sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tingkat sumber daya manusia Desa Kaba-kaba masih tergolong kurang baik. Namun, penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) berlangsung tanpa hambatan. Mendorong staf untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran adalah metode integrasi sumber daya manusia yang dilakukan.

Kedua, Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula, yang dilakukan oleh Sry Anita Gusasi dan Felmi D. Lantowa, Hasil penelitian Pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo pertanggungjawabannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, segi standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah sering berubah-ubah dan jaringan yang kurang memadai masih menjadi kendala bagi desa dalam penerapan aplikasi SISKEUDES. Selain itu, Desa Huyula telah taat dalam menjalankan aplikasi SISKEUDES, Desa Huyula mengalami perubahan positif termasuk peningkatan pelaporan akuntabilitas keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Ketiga, Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, yang dilakukan oleh Sulistyowati, Norita Citra Y dan Elok Fitriyah. Hasil penelitian analisis pelaksanaan SISKEUDES di Desa Besuki cukup efektif yang meliputi tugas perencanaan yang dilakukan oleh sekretaris, tugas pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan bendahara, serta tugas pelaporan, dan tugas pertanggungjawaban yang dilakukan kepala desa yang telah melaksanakan tugas cukup baik dan menyediakan fasilitas informasi untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi

tentang pengelolaan keuangan desa.

Kesamaan dengan penelitian yang diangkat peneliti yaitu mengenai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sedangkan perbedaannya terletak pada tahun serta Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sedangkan perbedaannya terletak pada tahun serta lokasi penelitian dilakukan. Perbedaan lain berfokus pada penerapan SISKEUDES sehingga dapat mencegah terjadinya kasus korupsi dengan hasil akhir terciptanya laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi yang sangat diperlukan, mengingat pernah terjadinya kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa Karang Sentosa pada tahun 2010.

Penelitian ini akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Karang Sentosa yang diharapkan dengan penelitian ini masyarakat kembali timbul rasa percaya kepada Kepala Desa Karang Sentosa. Terlebih Desa ini belum pernah menjadi tempat penelitian. Sehingga nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa Karang Sentosa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar dapat dijadikan rekomendasi dan pertimbangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena, atau *setting* sosial yang berhubungan dengan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berusaha untuk menggambarkan, mensintesis berbagai realitas atau skenario sosial yang terjadi di masyarakat dan berusaha untuk menggambarkan kenyataan di permukaan sebagai karakteristik keadaan dan peristiwa tertentu (Arikunto, 2014).

Kajian dianalisis dengan metode induktif yaitu dengan cara memfokuskan penelitian dari hal-hal khusus ke umum sehingga dari proses tersebut data yang diperoleh akan lebih menonjol dalam penelitian kualitatif dan dipadu oleh landasan teori serta fokus penelitian diselaraskan dengan situasi aktual (Neuman, 2016).

Teknik pengumpulan data yang pertama dengan studi pustaka yang diperoleh seperti buku pedoman operasi SISKEUDES, buku kerja SISKEUDES, undang-undang, skripsi, dan jurnal yang memberikan informasi terkait penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua dengan melakukan observasi untuk melihat kenyataan atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan pada lokasi penelitian yaitu di Desa Karang Sentosa. Ketiga melakukan wawancara mendalam dengan informan terkait seperti Kaur Keuangan sebagai Operator aplikasi SISKEUDES, Kepala

Desa, Ketua BPD dan Masyarakat yang dibantu alat-alat pendukung seperti buku catatan, alat perekam suara, dan kamera, yang terakhir peneliti mengumpulkan data dilengkapi dengan dokumentasi sehingga lebih *kredibel* atau dapat dipercaya (Moleong, 2017).

Teknik analisis data dengan mengorganisasikan data, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dengan memilih hal penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Langkah awal dengan menganalisis berdasarkan data yang didapat dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis ini menjadi langkah dalam penelitian untuk mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Apabila hipotesis telah dikembangkan berdasarkan data kemudian perlu mencari data lagi untuk menarik kesimpulan tentang apakah hipotesis itu benar atau salah berdasarkan data yang dikumpulkan (Moleong, 2017).

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019, p. 321) mengemukakan aktivitas yang terlibat dalam pengolahan data kualitatif dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan. Aktivitas dalam analisis data dibagi menjadi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Adapun beberapa rangkaian proses menurut (Basori, 2018) dari awal dibentuknya aplikasi hingga penyempurnaan dan *launching* SISKEUDES yang digunakan hingga saat ini, yaitu:

Table 1. Alur Proses Pembuatan Aplikasi SISKEUDES

Waktu Pelaksanaan	Proses Aplikasi Keuangan Desa
Januari - Maret 2015	BPKP membuat “Bimbingan dan Konseling pengelolaan keuangan desa”.
16 - 18 Mei 2015	Perwakilan BPKP Sulawesi Barat membuat aplikasi untuk desa.
15 - 18 Juni 2015	Penjaminan kualitas aplikasi untuk desa.
23 - 28 Juni 2015	Piloting aplikasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mamasa kepada perangkat dari 168 desa.
13 Juli 2015	Sukses diujicobakan, aplikasi <i>launching</i> dengan nama SIMDA Desa.
15 Agustus 2015	SIMDA Desa digunakan nasional dengan penambahan modul perencanaan dan berubah nama menjadi SISKEUDES.
8 November 2015	MoU antara Kemendagri dan BPKP untuk pengawalan keuangan desa.
27 November 2015	Surat Ditjen Bina Pemdes Kemendagri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar membagikan SISKEUDES dan bertahap memfasilitasi penerapan SISKEUDES di seluruh Desa
Selama 2016	Bimtek SISKEUDES dilaksanakan oleh Kemendagri dan BPKP bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat

	Kab/Kota dan beberapa aparat perangkat desa terpilih di 10 Provinsi.
Januari 2017	Diterbitkan SISKEUDES Rilis 1.05 disesuaikan dengan PMK Nomor 225/PMK.07/2017.
21 November 2018	Launching SISKEUDES versi 2.0 yang disesuaikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Sumber : Buku Pedoman Aplikasi SISKEUDES, 2018

Aplikasi SISKEUDES diperbarui menjadi Rilis Versi 2.0 dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tampilan seperti berikut :

Gambar 1. Tampilan Depan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0



Sumber : Buku Pedoman Aplikasi SISKEUDES, 2018

Peneliti menggambarkan bahwa dengan adanya otonomi daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat lingkup keuangan negara bukan sebatas pada kementerian dan pemerintah provinsi, melainkan bertambah pada sektor desa sehingga pengelolaannya perlu pengawasan yang ketat. Hal ini sejalan dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa masyarakat harus berpartisipasi, koordinasi dan mengawal dana desa.

Kenyataannya masih terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga rentan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Korupsi merupakan tindakan yang berdampak negatif bagi bangsa dan masyarakat. Menurut (Sofhian, 2020) penyebab terjadinya tindak pidana korupsi Sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Korupsi sering diakibatkan oleh kemiskinan. Namun, dasar dari Korupsi dengan alasan kemiskinan ini berasal dari aspek kebutuhan yang tidak terpenuhi.

2. Kekuasaan

Ungkapan "kekuasaan cenderung korup" mengacu pada fakta bahwa memperoleh kekuasaan memudahkan untuk bermain dengan akses ke sejumlah pihak penting yang strategis, yang mengarah pada korupsi.

3. Budaya

Menurut hasil penelitian yang dimuat dalam (Wirjono, 1986), masyarakat Indonesia cocok dengan tipe keluarga besar. Demikian disampaikan Profesor Kinoshita dari Waseda University di Jepang. Meskipun tindakan korupsi tidak dapat dibenarkan, masyarakat Indonesia dikenal memiliki rasa persaudaraan yang kuat, sehingga mereka memiliki sistem sendiri di mana keberhasilan salah satu anggota keluarga menentukan keberhasilan anggota lainnya.

4. Rendahnya Kualitas Moral Masyarakat

Kualitas moral ini ditentukan oleh banyak faktor, termasuk kemiskinan, pencapaian pendidikan, dan pengaruh media massa sebagai salah satu faktor kunci dalam pembentukan nilai-nilai sosial di masyarakat.

5. Lemahnya Kelembagaan Negara

Tidak semua organisasi pemerintah memperlakukan pegawainya dengan adil baik dalam hal insentif, atau gaji. Oleh karena itu, besar kemungkinan salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah kurangnya pendapatan. Mekanisme interaksi relasional menjadi penting dalam konteks ini karena beberapa institusi mengandung mekanisme interaksi relasional yang membuka celah korupsi dalam bentuk "suap".

Bukti adanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa Karang Sentosa, Achmad Surahman pada tahun 2010 sehingga pengelolaan keuangan desa harus dikawal dan diawasi semua lapisan cabang pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bekerjasama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Peran serupa di tingkat desa oleh sejumlah pihak, seperti:

1. Pemerintah desa yang berfungsi sebagai eksekutif secara kasat mata dan akuntabel dengan tetap menjaga kedisiplinan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mengawasi berjalannya pemerintah desa. Peran BPD sangatlah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena jika pengawasannya baik maka akan meminimalisir hal-hal yang menyimpang.

3. Masyarakat desa memiliki peran penting sebagai pemangku kepentingan yang perlu mengawasi keuangan pemerintah desa.

Jika semua berperan maka pengelolaan keuangan melalui proses penginputan laporan keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES berjalan sesuai dengan prosedur artinya data tidak akan dimanipulasi atau dapat dipastikan data yang diinput ke dalam aplikasi SISKEUDES benar-benar valid sehingga dapat menghasilkan dokumen penatausahaan yang sesuai. Hal tersebut dikonfirmasi kebenarannya pada saat peneliti mewawancarai ketua BPD yaitu Bapak Uya Sulaeman, SE yang menyatakan sebagai berikut :

“Akuntabel dan akuratnya data yang dihasilkan aplikasi SISKEUDES ini sangat sesuai, misalnya ada perencanaan perbaikan jalan di RT 008 sepanjang 200 Meter lalu diinput kedalam SISKEUDES, namun pada kenyataannya perbaikan jalan hanya 180 Meter, maka nanti hasilnya akan dipertanyakan kebenarannya. Oleh karena itu Operator SISKEUDES menuntut data yang diperoleh dilapangan harus sesuai dengan perencanaan sehingga dokumen yang dihasilkan akan sesuai.”

Kini dengan aplikasi SISKEUDES Desa dapat menghasilkan laporan lebih akuntabel dan transparan sehingga dapat mengurangi korupsi yang dilakukan kepala desa maupun aparat desa lainnya. Wawancara yang dilakukan oleh Bapak Sugimen Kartasasmita selaku Kaur Keuangan sekaligus Operator Aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Sentosa mengatakan bahwa “Dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini membawa perubahan terhadap laporan keuangan secara komputerisasi sehingga lebih memudahkan pengerjaannya serta hasilnya lebih akurat dan saat ini Desa berusaha melakukan transparansi dana desa dengan membuat *banner* Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021”.

Hal yang dikatakan Bapak Sugimen Kartasasmita selaku Kaur Keuangan sekaligus Operator Aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Sentosa terbukti pada saat peneliti melakukan observasi dengan tersedianya *banner* Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang terpampang jelas di depan kantor Desa Karang Sentosa seperti gambar berikut

“Dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini membawa perubahan terhadap laporan keuangan secara komputerisasi sehingga lebih memudahkan pengerjaannya serta hasilnya lebih akurat dan saat ini Desa berusaha melakukan transparansi dana desa dengan membuat *banner* Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021”.

Hal yang dikatakan Bapak Sugimen Kartasasmita selaku Kaur Keuangan sekaligus Operator Aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Sentosa terbukti pada saat peneliti melakukan observasi dengan tersedianya *banner* Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang terpampang jelas di depan kantor Desa Karang Sentosa seperti

gambar berikut :

Gambar 2. Banner Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG (Rp)
4.	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DESA			
4.1.2	= HASIL ASET DESA	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.214.221.900,00	5.214.221.900,00	0,00
4.2.1	= DANA DESA	1.327.788.200,00	1.327.788.200,00	0,00
4.2.2	= BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	1.098.662.900,00	1.098.662.900,00	0,00
4.2.3	= ALOKASI DANA DESA	1.683.371.000,00	1.683.371.000,00	0,00
4.2.4	= BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
4.2.5	= BANTUAN KEUANGAN APBD KABUPATEN/KOTA	974.400.000,00	974.400.000,00	0,00
JUMLAH PENDAFTARAN		5.286.221.900,00	5.286.221.900,00	
5.	BELANJA			
5.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	2.925.333.800,00	2.889.333.800,00	36.000.000,00
5.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.497.491.000,00	1.497.491.000,00	0,00
5.3	BIDANG PEMBINAAN KOMUNITAS	225.446.100,00	225.446.100,00	0,00
5.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	112.065.000,00	112.065.000,00	0,00
5.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	459.000.000,00	459.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		5.219.335.900,00	5.183.335.900,00	36.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		66.000.000,00	102.886.000,00	(36.000.000,00)
6.	PEMBAYAAAN			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	66.886.000,00	66.886.000,00	0,00
6.2.1	PEMBAYAAAN NETTO	(66.886.000,00)	(66.886.000,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)

Sumber : Desa Karang Sentosa, 2022

Berdasarkan gambar di atas, pemerintah Desa Karang Sentosa dengan jelas menunjukkan data dan informasi berupa realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilengkapi dengan jumlah nominalnya, menunjukkan bahwa terdapat upaya transparansi yang dilakukan pemerintah desa setempat berdasarkan hasil akhir dari SISKEUDES yang teraktivasi di Desa Karang Sentosa.

Keberadaan aplikasi SISKEUDES memudahkan pemerintah desa dalam mengelola keuangan sehingga akuntabel dan desa mampu untuk berusaha transparan terhadap laporan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Uya Sulaeman, SE selaku Ketua BPD yang berpendapat bahwa :

“Dalam perencanaan keuangan desa berbagai pihak turut serta berpartisipasi, tidak hanya Kaur Keuangan atau Kepala Desa saja tetapi Masyarakat memberikan masukan melalui BPD yang kemudian dimusyawarahkan bersama, jika disetujui maka akan direalisasikan dan pada hasil laporan pertanggungjawabannya menurut saya sudah sangat baik”.

Namun pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Karang Sentosa mereka tidak mengetahui bagaimana pelaporan keuangan desa dengan mengatakan bahwa :

“Saya tidak mengetahui bagaimana laporan keuangan desa dan tidak pernah secara langsung memberikan aspirasi maupun masukan untuk desa”.

Setelah peneliti konfirmasi ke Kepala Desa Karang Sentosa yaitu Bapak H. Karta Wijaya, S.Pd.I mengenai transparansi laporan keuangan desa beliau mengatakan hal yang sama dengan Ketua BPD yaitu Bapak Uya Sulaeman, SE sebagai berikut :

“Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa kita sama-sama bermusyawarah dalam perencanaan dana desa yang kemudian hasilnya akan diinformasikan berupa banner atau bahkan jika ada masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana realisasi dana desa akan kita jelaskan, agar tidak adanya kecurigaan maupun salah paham”.

Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Desa telah berusaha untuk melakukan transparansi dengan membuka aspirasi masyarakat terkait realisasi dana desa serta hasilnya dipampang jelas dengan mencetak *banner* yang diletakkan di depan kantor Desa Karang Sentosa. Namun masih kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam mengawal dana desa, sehingga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengawal dana desa agar tidak terulang kembali kasus korupsi di Desa Karang Sentosa.

Penerapan Aplikasi SISKEUDES memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni agar berjalan baik. Maka dari itu Kepala Desa Karang Sentosa yaitu Bapak H. Karta Wijaya, S.Pd.I memilih Bapak Sugimen Kartasasmita sebagai operator Aplikasi SISKEUDES sekaligus menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Karang Sentosa karena beliau telah berpengalaman selama kurang lebih 6 Tahun menjadi operator Aplikasi SISKEUDES pada masa kepemimpinan sebelum Bapak H. Karta Wijaya, S.Pd.I. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak H. Karta Wijaya, S.Pd.I :

“Saya memilih Bapak Sugimen Kartasasmita untuk mengoperasikan aplikasi SISKEUDES karena beliau sudah sangat berpengalaman pada masa pemerintahan sebelum nya menjadi Kaur Keuangan sekaligus operator aplikasi SISKEUDES jadi beliau sudah berhadapan dengan aplikasi ini selama kurang lebih 6 tahun dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta loyalitas dalam bekerja. Bahkan tidak hanya itu beliau selalu menjadi narasumber pada saat bimbingan teknis SISKEUDES atau keuangan desa, dan selalu diikuti sertakan dalam bimbingan teknis BPD dan bimbingan teknis Kepala Desa.”

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua BPD Karang Sentosa yaitu Bapak Uya Sulaeman, SE yang menyatakan sebagai berikut :

“Desa Karang Sentosa ini menjadi Koordinator SISKEUDES tingkat Kecamatan karena Operator yang mengoperasikannya sangat baik, jadi dari Desa-Desa yang ada di Kecamatan Karang Bahagia jika mengalami kendala atau kesulitan pada saat mengisi aplikasi SISKEUDES mereka bertanya ke Desa Karang Sentosa. Bahkan Desa Karang Sentosa merupakan Desa 10 terbaik di Kabupaten dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES Serta Bapak Sugimen kartasasmita ini menjadi pengurus SISKEUDES tingkat Kabupaten.”

Maka dengan diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah terjadi perubahan pada cara pandang Kepala Desa dalam menentukan sumber daya manusia (SDM) yang tepat dalam mengisi jabatan agar mumpuni dalam menjalankan tugas dan menghasilkan perubahan cukup baik bagi pemerintah Desa Karang Sentosa dengan memudahkan pelaporan pertanggungjawaban yang akurat. Sehingga tujuan dari Aplikasi SISKEUDES telah tercapai.

Dibuktikan dengan tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi di Desa Karang Sentosa dan SDM yang mengelola Aplikasi SISKEUDES dalam menginput laporan keuangan telah mumpuni. Namun dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal dana desa sangat minim sehingga perlu ditingkatkannya kesadaran bahwa pentingnya pengawasan yang dilakukan masyarakat terkait dana desa agar pemerintahan dapat berjalan selaras dan bersih dari korupsi.

Penutup

Penerapan Aplikasi SISKEUDES dinilai telah berjalan baik karena dapat membawa perubahan cukup baik bagi pemerintah Desa Karang Sentosa dengan memudahkan pemerintah desa dalam pelaporan pertanggungjawaban yang akurat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun Penerapan Aplikasi SISKEUDES baik namun pengelolaan keuangan desa tetap harus dikawal dan diawasi oleh semua lapisan termasuk masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Selain itu, pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam mengawal dana desa, sehingga masih dapat berpeluang terjadinya korupsi yang dilakukan kepala desa maupun aparat desa lainnya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Basori, A. (2016). *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. Bogor: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Bpkp.
- Basori, A., Puspawijaya, A., & Megantoro, G.R. (2018). *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*. Kementerian Dalam Negeri.
- Effendi, & Bachtiar. (2002). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Pt. Uhindo Dan Offset.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Sipd)Dalam Penyusunan Dokumen Rkpd Di Kabupaten Nganjuk.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Morenly Marchel Welley, R. A. (2018). Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya . *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.
- Muhammad Sapril Sardi Juardi, M. M. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa.
- Nardianto, R. (2020). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang .
- Neuman, L. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Pt Indeks.
- Siti, R. (2021). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea.
- Sofhian Subhan. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. Tatar Pasundan.
- Sry Anita Gusasi; Felmi D. Lantowa. (2021). Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula. *Journal Syariah And Accounting Public*.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sulina, G. A., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Sulistyowati, Y, N. C., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal Of Social Science And Business*.
- Sunarya, N. (2018). Efektivitas Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dpmd) Kabupaten Bekasi.
- Taufiequrachman, L. S. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.